

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perilaku Politik

Dalam buku yang berjudul “Perilaku Politik” karya Ihsan Hamid dijelaskan bahwa perilaku politik telah menjadi bagian dalam kajian ilmu politik yang kemudian jika disematkan pada sebuah kelompok masyarakat maka dapat didefinisikan sebagai suatu kesiapan untuk bertindak yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk menghadapi, merespon atau menilai masalah politik. Secara sederhana konsepsi perilaku politik yang dimaksudkan adalah sebuah reaksi perasaan yang kemudian melahirkan sebuah perilaku, perilaku/sikap atas reaksi yang timbul tentunya bersifat dinamis. Hal ini merujuk pada latar belakang dari timbulnya reaksi tersebut sehingga pembentukan perilaku politik tidak hanya berfokus pada sebuah respon tapi dari berbagai faktor.

Perilaku politik merupakan sebuah interaksi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat diantara lembaga pemerintah dan kelompok atau individu dalam masyarakat melalui mekanisme proses pembuatan pelaksanaan dan penegakan keputusan politik (Ramlan Surbakti, 1992:12). Surbakti menjelaskan bahwa perilaku politik terjadi melalui serangkaian mekanisme yang dilalui oleh dua atau lebih unsur

dalam sebuah proses politik. Proses politik yang dimaksud ialah dalam pembuatan pelaksanaan serta penegakan keputusan politik, artinya pandangan ini memiliki keleluasaan dalam menentukan perspektif politik.

Huntington dan Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* merumuskan teori partisipasi politik yang berarti suatu kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang bertujuan untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi yang dimaksudkan dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, efektif atau tidak efektif (Budiardjo, 2007). Pada teori ini, Huntington dan Nelson membagi perilaku atau partisipasi politik kedalam dua kategori, yakni: Pertama, partisipasi otonom, yang berarti perilaku politik terjadi akibat dorongan dari keinginan pelakunya sendiri untuk melakukan tindakan tersebut. Kedua, partisipasi mobilisasi, yaitu perilaku politik yang diinginkan atau digerakkan oleh orang lain bukan karena keinginan atau kesadaran pelakunya sendiri.

Pendapat Gabriel Almond mengenai partisipasi politik, menyatakan bahwa partisipasi politik atau perilaku politik terbagi dalam tiga kategori yakni artikulasi kepentingan, penyatuan kepentingan dan artikulasi kepentingan lanjutan. Partisipasi politik tidak hanya sebatas dalam mengambil peran atau bagian dengan konteks kegiatan politik. Menurutnya, Perilaku politik selalu diawali dengan adanya artikulasi kepentingan dimana seorang individu dapat mengontrol sumber daya politik, seperti halnya pemimpin partai politik atau seorang diktator politik (Hamid, 2020).

Dalam konteks pemilihan umum, menurut James N. Rosenau dalam karya Rakhmah yang berjudul “Komunikasi Politik Khalayak dan Efek” partisipasi politik dapat dipengaruhi oleh tiga dimensi partisipasi politik. Tiga dimensi partisipasi politik yang dimaksudkan adalah gaya kepemimpinan, motif partisipan dan konsekuensi partisipasi seorang dalam politik.

Pertama, gaya kepemimpinan, yang merujuk pada apapun yang dilakukan maupun bagaimana seorang melakukan sesuatu kegiatan seperti gaya pembicaraan politik, gaya umum berpartisipasi. Pada model gaya partisipasi terdapat beberapa kategori, yakni:

1. Langsung/wakilan
2. Kentara/tak kentara
3. Individual/kolektif
4. Sistematis/acak
5. Terbuka/tersembunyi
6. Berkomitmen/tak berkomitmen
7. Derita/kesenangan

Kedua, motif partisipasi, yang merupakan gaya partisipasi yang menyangkut pada motif orang yang membuatnya ambil peran, motif-motif gaya partisipasi yang diberikan berbeda-beda dalam hal sebagai berikut:

1. Sengaja/Tidak sengaja

2. Rasional/emosional
3. Kebutuhan psikologis/sosial
4. Diarahkan dari dalam/dari luar
5. Berpikir/tanpa berpikir

Ketiga, Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik, dimensi yang dapat dijelaskan melalui perbandingan dengan apa yang tidak dijelaskan sehingga memunculkan pertanyaan, beberapa hal yang termasuk kedalam konsekuensi partisipasi dalam politik adalah sebagai berikut:

1. Fungsional/disfungsional
2. Sinambung/terputus
3. Mendukung/menuntut

Ketiga dimensi partisipasi politik diatas, setiap orang mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara dalam partisipasi politik. Pada setiap dimensi atau hal partisipasi terdapat berbagai cara, yakni: gaya umum yang digunakan dalam partisipasi, motif partisipasi yang mendasari dalam melakukan kegiatan, dan konsekuensi dari berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik (Ridho, 2019).

2.1.2 Kiai dan Santri

Istilah kiai dan santri sudah tidak asing lagi bagi telinga masyarakat Indonesia. Istilah kiai menurut Sadali (2020) merupakan sentra pokok dalam lembaga pendidikan Islam yang menggunakan metode pondok (asrama) dan juga masjid sebagai sentra

lembaganya. Sedangkan istilah santri memiliki dua pendapat, sebagaimana dijelaskan oleh Nurcholis Madjid bahwa pendapat pertama menyatakan bahwa santri berasal dari bahasa sansekerta yaitu “Sastri” yang memiliki arti orang yang melek huruf. Pendapat ini didasarkan pada orang Jawa yang sedang mempelajari agama melalui bacaan dari kitab-kitab yang bertuliskan bahasa Arab. Pendapat kedua, menjelaskan bahwa santri berasal dari bahasa India yang memiliki arti seorang yang paham kitab suci agama Hindu atau secara umum dapat dikatakan sebagai seorang yang ahli dalam memahami buku suci, buku agama ataupun buku ilmu pengetahuan. Saat ini istilah santri dikenal juga dengan “cantrik” yang berarti seorang yang sedang berguru kepada orang pandai dan selalu setia mengikuti gurunya.

Achmad Patoni (2019), dalam bukunya yang berjudul “Kiai Pesantren dan Dialektika Politik Kekuasaan” dijelaskan bahwa menurut Dhofier kiai merupakan sebuah gelar yang diberikan secara khusus oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang mengajarkan kitab-kitab kepada santrinya dan memiliki atau menjadi pimpinan pada sebuah pesantren. Gelar kiai sebenarnya tidak hanya melekat pada ahli agama atau terhadap pemangku pondok pesantren saja, Dhofier dalam penelitiannya menemukan bahwa kata “kiai” jika ditinjau secara mendalam ternyata memiliki makna yang luas. Secara etimologis, kata kiai berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada tiga gelar. Pertama, kiai merupakan istilah yang digunakan atau sebutan pada benda-benda pusaka atau barang terhormat. Kedua, istilah kiai disematkan/ditujukan kepada tokoh masyarakat atau orang tua, yang dilekatkan karena keberadaan posisinya sebagai figur

masyarakat sebagai sebuah penghormatan dimata masyarakat kepada sang tokoh. Mereka yang bergelar kiai dinilai oleh masyarakat memiliki nilai lebih dalam sebuah bidang tertentu dan gelar tersebut bukan karena permintaan, tetapi timbul secara alami dalam keikhlasan pandangan masyarakat umumnya. Ketiga, gelar kiai ini diberikan kepada seseorang oleh masyarakat karena ahli dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam dan juga memiliki pesantren serta mengajar kitab kuning.

Ada juga istilah ulama yang sering disetarakan dengan kiai, Ulama merupakan istilah dalam bahasa arab dengan bentuk *jamak* dari kata *al 'aalim* yang memiliki arti seorang yang memiliki pengetahuan. Penggunaan istilah ulama yang dilekatkan pada seseorang tidak akan terlepas pada pengetahuan serta pemahamannya mengenai Al-Qur'an. Definisi ulama atau karakteristik yang terdeskripsi lebih didasarkan kepada kriteria normatif. ‘

Dalam partisipasinya pada politik, Patoni (2019) menguraikan kiai dapat diklasifikasikan yang didasarkan pada motivasi, tindakan dan aplikasi moral kiai dalam politik, yakni:

1. Kiai Mediator Politik’’

Dalam realitas dunia politik yang terjadi, kiai memiliki pengaruh pada politik dan tidak akan terlepas di dalamnya. Hal ini disebabkan dalam berbagai faktor, salahsatunya karena pengaruh pesantren yang dominan dalam pembentukan kehidupan sosial masyarakat. Kiai memiliki opsi untuk tidak berperan secara aktif dalam dunia politik dan lebih memilih untuk berafiliasi dengan salahsatu partai atau

tokoh politik. Keterlibatan berafiliasi ini dapat dengan mengistilahkan pada bentuk relasi pertemanan ataupun dengan istilah lain. Realitas politik seperti ini merupakan tindakan politik yang dibangun tanpa pondasi, konsistensi dan identitas yang bersifat pertulang politik dalam menciptakan sebuah afiliasi politik.

2. Kiai Pejabat Administratif

Terdapat dualisme status yang marak terjadi dalam konteks politik saat ini. Kiai yang merupakan panutan masyarakat juga bertindak sebagai pemegang kekuasaan negara, hal ini tidaklah bertentangan dengan agama karena Rosul juga memiliki peran ganda yakni sebagai pembawa risalah dan juga sebagai pemimpin pemerintahan sehingga posisi ini merupakan menjadi argumen kiai dalam melegalkan dualisme jabatan.

2.1.3 Perilaku Memilih

Terdapat tiga pendekatan yang dapat menjadi basis utama guna membaca perilaku pemilih. Pertama, pendekatan sosiologis yang dipionir oleh Lazarsfeld pada tahun 1940 atau yang disebut juga dengan metode perilaku pemilih Columbia dimana dalam pendekatan ini terdapat asumsi bahwa pengelompokan sosial dan karakteristik sosiologis dapat berpengaruh terhadap perilaku pemilih secara signifikan. Asumsi ini memberikan pemahaman bahwa dengan adanya pengelompokan sosial dan karakteristik sosiologis akan membawa seseorang mencoba memahami individu lain terhadap proses sikap preferensi politiknya. Kedua, pendekatan psikologis yang dipelopori August Campbell atau dikenal juga dengan mazhab Michigan yang

berkembang pesat di Amerika Serikat pada tahun 1950. Dalam mazhab ini, dalam pembentukan orientasi politik terbentuk atas dorongan atau keterikatan psikologis yang disebabkan adanya kedekatan yang kemudian mempengaruhi terhadap orientasi politiknya dalam pemilu. Ketiga, pendekatan *rational choice* yang merupakan kritik terhadap pendekatan sosiologis dan psikologis karena terdapat kekhawatiran dalam melihat perubahan perilaku pemilih yang tidak dapat terjawab dengan dua pendekatan sebelumnya yang berangkat dari teori ekonomi sebagai yang melatarbelakangi pendekatan ini. Pendekatan ini menjelaskan bahwa ekonomi-politik dapat menjadi parameter yang menjelaskan perilaku pemilih, sehingga muncul asumsi bahwa sikap memilih masyarakat dapat didorong oleh kepentingan mereka, apalagi kepentingan yang berkaitan dengan material dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pendekatan ini didasarkan pada konsep untung-rugi dimana pemilih akan berhati-hati dalam menentukan preferensi politiknya dengan menggunakan rasionalitas sehingga pendekatan ini berguna untuk melihat sikap masyarakat mengarahkan pada orientasi politik rasional (Hamid, 2020:56-61).

Dalam buku yang berjudul *Perilaku Pemilih: Teori dan Praktek* karya Syafendry (2016) diuraikan mengenai teori Weber tentang rasionalitas yang dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyeleksi sarana-sarana karena efektivitasnya, menghormati aturan-aturan bukan berdasarkan pada kecocokannya dengan adat. Weber berpendapat bahwa sejumlah manusia lebih rasional dibandingkan dengan yang lain. Berbeda dengan Durkheim yang menyatakan

bahwa manusia bersifat rasional, dimana rasionalitas menurut Durkheim terwujud dalam kewajiban konseptual dengan bentuk yang bervariasi antara satu sama lainnya yang diambil secara rasional.

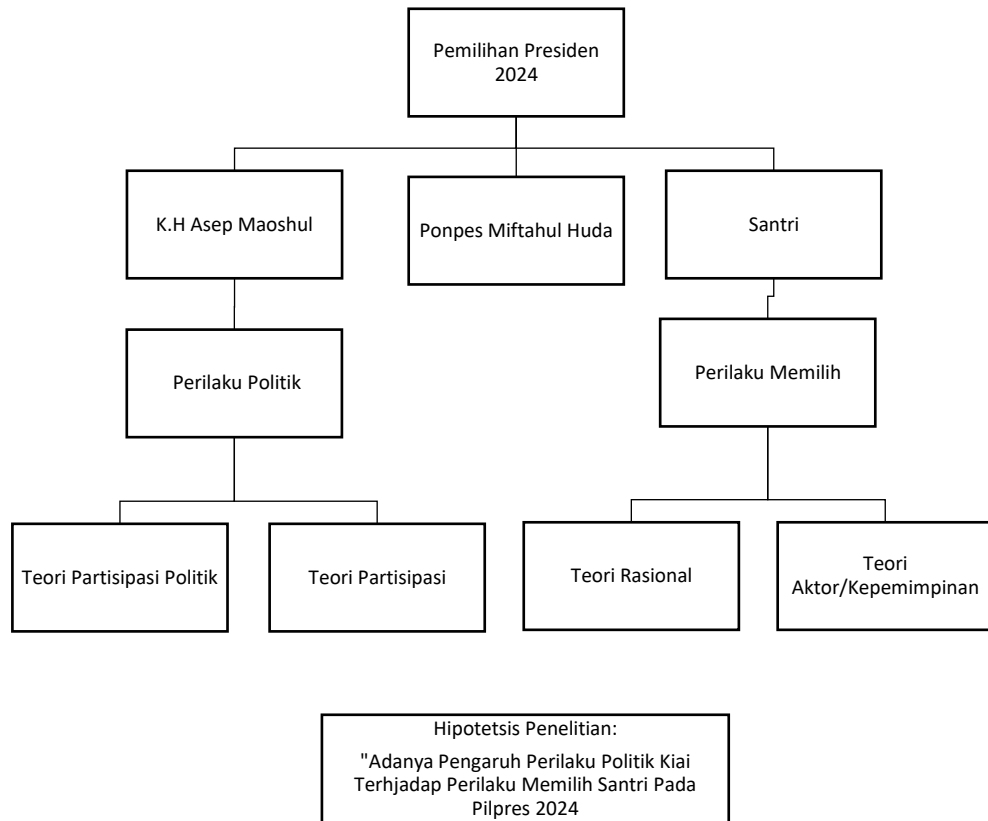
Terdapat empat aspek yang mendasari seseorang dalam melakukan tindakan beralasan menurut *Fishbein* dan *Azjen*, yakni: Pertama, aspek *Behavioural belief*, berkaitan dengan pengetahuan yang akan membawa pengetahuan perilaku pada konsekuensi utama. Asumsi rasional ini didasarkan pada berbagai hal seperti pada program, kredibilitas, kemampuan para calon. Sedangkan asumsi irasional didasarkan pada kharisma, kedekatan serta persamaan dengan calon. Kedua, aspek *Outcome Evaluation*, yang berkaitan terhadap pengetahuan utama atau keyakinan sebagai aspek evaluasi. Aspek ini akan memunculkan berbagai pengetahuan atau keyakinan yang akan menghasilkan sebuah evaluasi kemudian pada akhirnya aspek-aspek tersebut akan membentuk sikap. Ketiga, aspek *Normative belief* atau *signifikan other*, aspek yang berkaitan dengan pandangan orang-orang terdekat yang mempengaruhi perilaku. Ayah, ibu, mertua, guru, kepala desa, alim ulama dan siapa saja yang berpengaruh terhadap individu merupakan orang terdekat yang biasa dalam memberikan pandangan. Keempat, aspek *Motivation to comply*, aspek yang berkaitan motivasi yang muncul untuk patuh terhadap pandangan atau pendapat orang berpengaruh. Artinya asumsi ini menjelaskan bahwa penentuan pilihan yang tertuju pada seseorang bukan karena patuh pada orang-orang yang berpengaruh.

Dalam perspektif psikologis, terdapat dua teori yang menjelaskan partisipasi politik pada perilaku pemilih yaitu rational actor theory (RAT) dan *self categorization theory*. Teori RAT menjelaskan bahwa perilaku politik merupakan proses kalkulasi untung rugi (*cost-benefit*). Sedangkan *self categorization theory* atau dikenal juga dengan *social-identity theory* menjelaskan bahwa perilaku politik merupakan bentuk dari proses identifikasi individu dengan kelompok sosial.

Teori aktor rasional mengungkapkan bahwa dalam menentukan pilihan dapat dianalisis secara untung rugi oleh individu dalam peristiwa politik terhadap pilihannya. Pilihan yang dipersepsikan oleh pemilih ialah mengenai kelayakannya seorang calon pilihan menjadi seorang pemimpin. Dalam teori pemimpin, terdapat empat perspektif yang dapat menjelaskan proses lahirnya seorang pemimpin yakni teori sifat (*trait theory*), teori situasional (*situational theory*), teori transaksional (*transactional theory*), dan teori identitas sosial (*social identity theory*).

Dalam *Social identity theory*, teori ini memandang bahwa keputusan memilih merupakan hasil dari proses identifikasi individu dengan kelompok. Penentuan dan pengidentifikasian terjadi akibat dari kesamaan identifikasi individu dengan pilihannya pada beberapa dimensi diantaranya berdasarkan pada kesamaan norma, ideologi, kepentingan, kesamaan etnis, atau suku bangsa.

2.2 Definisi Operasional



Pemilihan presiden tahun 2024 merupakan pesta demokrasi nasional ini diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo & Mahfud MD. Perhelatan politik nasional tentunya akan melibatkan banyak elemen penunjang serta pendukung guna mencapai tujuan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan non formal yang masih eksis sampai saat ini, salah satu pesantren terbesar di Tasikmalaya adalah Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya. Dalam pesantren, kiai merupakan elemen yang sentral serta strategis yang mampu

memberikan dampak terhadap kehidupan santri maupun masyarakat sekitar. Disamping itu juga, pesantren menjadi salah satu objek strategis dalam mencari suara oleh para politisi sehingga terjadi kunjungan-kunjungan politisi yang berbasis kepentingan politik maupun kepentingan lainnya. Dalam ajang kontestasi ini perlu adanya perhatian kepada kiai Pesantren karena kiai merupakan pimpinan tertinggi pesantren dan menjadi objek utama dalam upaya mencari suara. Partisipasi kiai dalam politik seharusnya tidak menjadi pokok masalah, tetapi jika kiai memiliki keterlibatan dalam politik praktis maka akan menjadi pokok masalah. Fenomena tersebut didukung dengan pengklasifikasian kiai dalam partisipasi politik yang dijelaskan oleh Ahmad Patoni yakni, kiai mediator politik dan kiai pejabat administratif.

Terdapat beberapa konsep dan teori dalam perilaku politik yang kemudian dikerucutkan dalam partisipasi politik. Ihsan Hamid menyatakan konsepsi perilaku politik merupakan sebuah reaksi perasaan yang melahirkan sebuah perilaku/sikap atas timbulnya reaksi yang bersifat dinamis. Sedangkan dalam konteks pemilu, James N. Rosenau menyebutkan terdapat tiga dimensi yang dapat mempengaruhi dalam partisipasi politik, yaitu gaya kepemimpinan, motif partisipan dan konsekuensi partisipasi seorang dalam politik. Konsep-konsep tersebut menjadi dasar dalam penelitian guna menggambarkan perilaku politik kiai.

Terdapat dua teori yang akan digunakan guna menjelaskan perilaku politik. Pertama, teori partisipasi politik menurut Huntington & Nelson yang membagi partisipasi politik kedalam dua kategori,

1. Partisipasi otonom, yang berarti partisipasi didasarkan pada kehendak sendiri
2. Partisipasi mobilisasi, yang berarti partisipasi didasarkan pada dorongan orang lain bukan atas dasar dorongan pribadi

Kedua, teori partisipasi menurut Gabriel Almond yang membagi partisipasi politik kedalam tiga kategori, yakni:

1. Artikulasi Kepentingan
2. Penyatuan Kepentingan
3. Artikulasi kepentingan lanjutan

Kedua teori tersebut digunakan untuk menjelaskan perilaku politik dalam konteks partisipasi politik yang lebih komprehensif dan dapat memfokuskan pada objek penelitian. Kedua teori tersebut dapat berguna menentukan metode yang digunakan dalam penelitian dan juga dapat menjadi dasar dalam membangun hipotesis penelitian

Dalam konteks perilaku pemilih, terdapat tiga pendekatan yang berguna untuk menganalisis/membaca perilaku memilih:

1. Sosiologis
2. Psikologis
3. *Rational Choice*

Menurut Ihsan Hamidi, Pendekatan-pendekatan diatas menjadi basis utama dalam melakukan analisa terhadap perilaku memilih karena dapat memahami individu

maupun kelompok dari berbagai perspektif yang kemudian dapat melihat orientasi memilih.

Terdapat dua teori yang digunakan untuk menganalisis perilaku memilih serta menggambarkan orientasi perilaku memilih. Teori Rasionalitas menurut Weber menjelaskan terdapat empat aspek yang menjadi dasar dalam melakukan tindakan rasional:

1. Behavioural belief
2. Outcome evaluation
3. Normative belief
4. Motivation to comply

Syafendry (2016) mengatakan dalam perspektif psikologis ada dua teori yang menjelaskan partisipasi politik pada perilaku memilih, yaitu:

1. Teori RAT (Rational Actor Theory)
2. Teori SCT (Self Categorization Theory)

Dalam teori aktor/kepemimpinan, terdapat empat perspektif yang membangun dan menjadi dasar seorang pemimpin, yaitu:

1. Sifat
2. Situasional
3. Transaksional
4. Identitas Sosial

Konsep-konsep serta teori yang diuraikan diatas digunakan untuk menggambarkan variabel perilaku politik kiai dan juga variabel perilaku memilih santri. Konsep perilaku kiai dalam partisipasi politik menjelaskan adanya dorongan yang diberikan terhadap perilaku memilih dalam berbagai perspektif. Artinya, partisipasi politik kiai mampu menjelaskan akan adanya peran aktor politik dalam orientasi perilaku memilih. Dalam konteks perilaku memilih, terdapat beberapa pendekatan yang mampu menjelaskan dan membaca orientasi perilaku pemilih. Hal ini didasarkan pada pendekatan-pendekatan partisipasi politik yang selalu mengasumsikan adanya faktor penggerak dalam menjelaskan orientasi perilaku memilih santri.

Pengoperasionalisasian konsep-konsep dan teori diatas yang menggambarkan adanya dorongan yang terjadi dalam perilaku politik terhadap orientasi perilaku memilih melahirkan hipotesis penelitian. Adapun hipotesis yang terbangun berdasarkan pada uraian diatas ialah adanya pengaruh perilaku politik kiai terhadap perilaku memilih santri pada Pilpres 2024.